

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.P. Parlindungan, 1991, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- A.P. Parlindungan, 1997, *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP. 24 Tahun 1997) Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP. 37 Tahun 1998)*, Mandar Maju, Bandung.
- AP Parlindungan, 1973, *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*, Alumni, Bandung.
- Agus Dwiyanto (editor), 2008, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Cetakan Ketiga, Yogyakarta.
- Ana Silviana, 2012, *Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang..
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, cetakan kedua, Semarang.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Jambatan, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1997, *Simposium UUPA Dan Kedudukan Tanah-tanah Adat Dewasa Ini*, BPHN Kalsel dan FH. Unilam, Bina Cipta, Kalimantan Selatan, hlm. 30.
- Effendi Perangin, 1991, *Hukum Agraria indonesia Suatu Telaah dari Sudut pandang Praktisi Hukum*, CV.Rajawali, Jakarta, hlm.1

- Firman Muntaqo, 2010, *Karakter Politik Hukum Pertanahan Era Orde Baru dan Era Orde Reformasi*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Gunanegara, 2008, *Rakyat & Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Pelajaran Filsafat Teori Ilmu Juresprudensi*, cetakan pertama (1), PT. Tatanusa, Jakarta
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- H. Juniarso Ridwan, Achmad Sodik. 2010, *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum Dari Zaman Yunani Kuno sampai Abad 20*, Cetakan 1, Nuasa, Bandung.
- I.G.N. Sugangga, 1994, *Pengantar Hukum Adat*, Semarang, Universitas Diponegoro.
- J.B. Daliyo dkk, 1983, *Hukum Agraria I, Buku Panduan Mahasiswa*, PT Prenhallindo, Jakarta.
- Jayadi, Setiabudi, 2012, *Tata cara Mengurus Tanah rumah serta Segala Perizinannya*, Buku Pintar, Yogyakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1990, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lexy J. dan Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Muhammad Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Muchtar Wahid, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis*, Republika, Jakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Ronny Hanintijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Soedharyo Soimin, 2004, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 2000, *Metodelogi Research* Jilid 1, Abdi Offset, Yogyakarta.
- Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: UI.
- Soebekti Tamara, 1961, *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim Teknis Program Pengembangan Kebijakan dan Managemen Pertanahan, Kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional (Jakarta: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas dan Direktorat Pengukuran dan Pemetaan BPN, 2004).
- Umar Ma'ruf, 2014, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah & Asas-asas Hukum Pertanahan*, Unissula Press, Semarang.
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Widhi Handoko, 2014, *Kebijakan Hukum Pertanahan*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta.
- Widhi Handoko, SH, 2014, *Kebijakan Hukum Pertanahan, Sebuah keadilan Refleksi Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Winarmo Surachmad, 1973, *Data dan Tehnik Research*, Tarsito, Bandung.
- Yudhi Setiawan, 2010, *Hukum Pertanahan Teori dan Praktik*, Cet. Pertama, Malang, Bayumedia Publishing, Malang.

B. Internet

Ferry Mursyidan Baldan adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang menjabat dari 27 Oktober 2014 pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo,

http://id.wikipedia.org/wiki/Ferry_Mursyidan_Baldan, Diakses pada tanggal 24 November 2015.

Somyaputra, <https://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/31/perjanjian-jual-beli/>, diakses pada tanggal 21 Januari 2016.

Joko Widodo adalah Presiden Indonesia ketujuh yang menjabat sejak 20 Oktober 2014. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014, http://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo, Diakses pada tanggal 24 November 2015.

Widhi Handoko, "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Tentang Stelsel Publisitas Negatif Berunsur Positif pada Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik Badan Pertanahan Nasional)", hlm. 2. (Sumber: <http://widhihandoko.com>, Diakses pada tanggal 10 Desember 2015).

<http://historysander.blogspot.co.id/2013/01/sejarah-kota-jakarta.html>, diakses pada tanggal 2 Februari 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

D. Hasil Wawancara Responden

Sumanto, Wawancara, Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat, (Jakarta Barat, 7 Desember 2015).

Benny, Wawancara, Kasi Pemerintahan Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, (Jakarta Barat, 9 Desember 2015)

Zainudin Zein, Wawancara, selaku Kasubsi Balik Nama Kantor Pertanahan Jakarta Barat, (Jakarta Barat, 7 Desember 2015).

Media Oktriano. A, Wawancara, selaku Kepala Seksi Survey Potensi Tanah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta, (14 Januari 2016).

Makmur Tridharma, Wawancara, selaku Notaris Kebon Jeruk Jakarta Barat, (Jakarta Barat, 10 Desember 2015).

Sugiyadi, Wawancara, selaku Kasubsi Sengketa Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat, (Jakarta Barat, 7 Desember 2015).

Mochamad Fahmi, Wawancara, selaku Kepala Lurah Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. (Jakarta Barat, 5 Desember 2015).

